

Vocational Education Policy 

WHITE PAPER

Vol. 1 Nomor 18 Tahun 2019

ISSN : 2685-5739

7TH
MENUJU
INDONESIA
UNGGUL

DARURAT GURU KEJURUAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)



BETTER POLICIES FOR BETTER VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING



Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Dikdasmen
Kemendikbud

SMK
BISA-HEBAT
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF

Susunan Dewan Redaksi :

VOCATIONAL EDUCATION POLICY, WHITE PAPER

ISSN : 2685-5739

Volume 1 No. 18 Tahun 2019

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Direktur PSMK, Dr. M. Bakrun, M.M

Ketua Redaksi

Kasubdit Program dan Evaluasi, Arie Wibowo Khurniawan, S.Si, M.Ak.

Redaksi Pelaksana

Chrismi Widjajanti

Abdul Harris

Farid Prasetyo Adi

Muhammad Abdul Majid

Ahmad Rofiuddin Syafaa

Editor

Gustriza Erda, S.Si, M.Si.

Fotografi, Desain & Artistik

Ari

Muhammad Raidinoor

Online Redaksi

Muhammad Herdyka

Mitra Redaksi (*Editorial Advisory Board*)

1. Prof. Dr. Waras Kamdi, M.Si (Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang)
2. Prof. Dr. Suwarna, M.Pd (Universitas Negeri Yogyakarta)
3. Hamid Muhammad, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta)
4. Dr. Ima Ismara, M.Pd., M.Kes. (Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta)
5. Irmawaty, SE., M.Si (Universitas Terbuka)

Alamat Redaksi dan Distribusi :

Redaksi VOCATIONAL EDUCATION POLICY, WHITE PAPER

Gedung E Lantai 12-13 Kompleks Kemendikbud

Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270

Telp. (021) – 5725477 (Hunting) 5725471-74 Fax. (021) – 5725049

Laman : psmk.kemdikbud.go.id, Surel : program.psmk@kemdikbud.go.id



DARURAT GURU KEJURUAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Arie Wibowo Khurniawan¹, Gustriza Erda²

Abstrak. Revitalisasi SMK tidak akan berhasil dan dapat berjalan kontinu apabila tidak disertai dengan ketersediaan guru kejuruan yang cukup dan kompeten. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam revitalisasi SMK di Indonesia saat ini adalah tidak mencukupinya tenaga pendidik/ guru kejuruan di hampir semua wilayah. Oleh karena itu, kajian kebijakan ini membahas analisis kebutuhan guru untuk tiap bidang keahlian di SMK serta beberapa usulan strategi alternatif yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan pihak yang terkait guna mencukupi kebutuhan guru kejuruan di Indonesia. Dengan menggunakan hasil pengolahan data yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Guru Dikmen dan LK Kemendibud, diperoleh bahwa pendidikan pada jenjang SMK di Indonesia masih sangat kekurangan guru PNS, khususnya guru kejuruan. Meskipun telah dibantu dengan guru honorer yang terdiri dari guru tidak tetap (GTT) dan guru tetap yayasan (GTY), namun jumlahnya masih jauh dari kata ideal. Belum lagi, kedepannya banyak guru yang pensiun karena berakhirnya masa jabatan. Guru paling banyak pensiun pada bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa serta Bisnis dan Manajemen dengan program Keahlian Teknologi Konstruksi Dan Properti, Teknik Otomotif dan Manajemen Perkantoran. Dalam merevitalisasi SMK khususnya memenuhi kebutuhan guru kejuruan tersebut, beberapa rekomendasi alternatif yang diusulkan diantaranya: (1) Mengingat bahwa saat ini Indonesia sedang memasuki darurat guru kejuruan SMK maka sebaiknya perlu dilakukan pengalihan sementara pengelolaan guru oleh Kemdikbud sampai dengan kondisi ketersediaan guru kejuruan normal kembali; (2) Perlu adanya pengangkatan guru kejuruan baru secara sistematis, terstruktur dan masif. Dapat dimulai dengan melakukan pengkaderan guru kejuruan dengan memilih lulusan SMK terbaik yang dipersiapkan menjadi guru kejuruan SMK dengan diberi beasiswa S1 dan diberi jaminan pengangkatan menjadi PNS guru kejuruan; (3) Melakukan upgrading peralatan praktik disertai transformasi organisasi P4TK Kejuruan Kemdikbud dengan mengembalikan fungsi utamanya hanya untuk mendidik guru kejuruan SMK yang banyak belum dilatih dan mengubah kelembagaannya menjadi sebuah lembaga Badan Layanan Umum (BLU) sehingga organisasi tersebut mampu mandiri dan lebih produktif dan kompetitif dalam menghasilkan guru-guru kejuruan yang handal di Indonesia; (4) Mendorong terjadinya revitalisasi LPTK dan Politeknik yang menghasilkan guru kejuruan SMK agar guru kejuruan yang dihasilkannya kompeten karena lebih banyak praktek daripada teori; (5) Apabila dibutuhkan, mendorong pemerintah daerah provinsi melakukan peleburan atau penutupan terhadap SMK yang memiliki siswa sedikit dan cenderung menurun tiap tahunnya.

Kata Kunci: guru kejuruan, revitalisasi, P4TK Kejuruan, BLU

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Peraturan terkait pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pasal tersebut bermakna bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan

setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Oleh karena itu, setiap warga negara harus dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 ayat 2 UUD 1945). Pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya yang memiliki kompetisi yang tinggi dalam menjawab era globalisasi yang penuh dengan tantangan (Kompasiana, 2013).

Salah satu unsur penting dalam pendidikan adalah tenaga pendidik atau guru. Guru menjadi titik sentral dan awal dari semua pembangunan

¹ Kepala Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Dikdasmen, Kemdikbud

² Staf Subdit Program dan Evaluasi

pendidikan. Guru merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tanpa adanya guru, pendidikan hanya menjadi slogan dan pencitraan karena segala bentuk kebijakan dalam sektor pendidikan pada akhirnya yang akan menentukan tercapainya tujuan pendidikan adalah guru. Muhson (2004) menegaskan bahwa guru sebagai pihak yang berhubungan langsung dalam proses pembelajaran di kelas memiliki peran yang vital dalam meningkatkan kualitas anak didiknya.

Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kemampuan para pendidiknya untuk mengubah karakter generasi penerusnya ke depan. Menurut Daoed Yoesoef (1980), seorang guru mempunyai tiga tugas pokok yaitu tugas profesional, tugas manusiawi, dan tugas kemasyarakatan (*sivic mission*). Tugas profesional berkaitan dengan logika dan estetika. Tugas profesional dari seorang guru yaitu meneruskan atau transmisi ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai lain yang sejenis yang belum diketahui anak dan seharusnya diketahui oleh anak. Tugas manusiawi adalah tugas-tugas membantu anak didik agar dapat memenuhi tugas-tugas utama dan manusia kelak dengan sebaik-baiknya. Tugas-tugas manusiawi itu adalah transformasi diri, identifikasi diri sendiri dan pengertian tentang diri sendiri. Sementara, tugas kemasyarakatan merupakan konsekuensi guru sebagai warga negara yang baik, turut mengemban dan melaksanakan apa-apa yang telah digariskan oleh bangsa dan negara lewat UUD 1945 dan GBHN. Ketiga tugas guru itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam kesatuan organis harmonis dan dinamis.

Keberhasilan proses pendidikan dapat dikatakan sangat bergantung pada peran guru di sekolah. Untuk itu, guru sebagai komponen kunci dalam pendidikan dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan

sebaik-baiknya untuk mewujudkan kejayaan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, peran guru dalam meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia tidak dapat diabaikan begitu saja. Ketersediaan dan kecukupan guru di tiap sekolah harus dapat terpenuhi. Karena keberhasilan pendidikan akan memberikan dampak pada kemajuan pendidikan yang pada akhirnya mampu mewujudkan manusia Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia.

Menurut *Teacher Employment & Deployment*, World Bank 2008 salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia adalah ketidakmerataan yang mencolok dalam penempatan guru di Indonesia. Hampir semua daerah kekurangan guru, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Tercatat, terdapat 66% sekolah terpencil mengalami kekurangan guru sementara 68% perkotaan dan 52% pedesaan memiliki kelebihan guru. Selain itu, tercatat bahwa terdapat guru yang bukan PNS di SMK negeri sebanyak 52.639 orang dan guru bukan PNS di SMK Swasta sebanyak 126.510 orang. Tingginya jumlah guru non PNS ini menjadi indikasi bahwa masih banyak sekolah yang kekurangan guru.

Tercukupinya tenaga pendidik di seluruh pelosok negeri menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai upaya memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, pemerintah harus terus berupaya melakukan pemenuhan kebutuhan guru di sekolah negeri, khususnya di sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan guru. Oleh sebab itu, kajian kebijakan ini membahas analisis kebutuhan guru untuk tiap bidang keahlian di SMK serta strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan pihak yang terkait guna pencukupan guru di Indonesia. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan

informasi yang lebih terperinci tentang analisa dan strategi pemenuhan kebutuhan guru, khususnya guru kejuruan di SMK yang tersebar di Indonesia.

Tujuan

Tujuan kajian kebijakan ini adalah untuk melakukan analisis tentang kebutuhan guru di SMK Negeri, khususnya guru yang mengampu mata pelajaran kejuruan atau guru kejuruan. Diharapkan bahwa informasi yang dihasilkan dapat menjadi suatu pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam proses pembuatan rekomendasi serta dapat dijadikan perumusan kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan guru SMK sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia

Manfaat

Kajian kebijakan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan di bidang pendidikan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan pemerataan tenaga didik. Untuk pembaca, kajian kebijakan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi atau pembanding bagi kajian kebijakan berikutnya serta dapat memberikan landasan untuk kajian kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan.

METODE

Data

Data yang digunakan dalam kajian kebijakan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Data yang ditampilkan berupa data guru SMK berdasarkan bidang keahlian dan program keahlian. Perhitungan guru dilakukan berdasarkan jumlah guru yang berstatus aktif dan mengajar mata

pelajaran yang jelas di satu sekolah induk dan tidak termasuk kepala sekolah yang sudah tidak mengajar/membimbing.

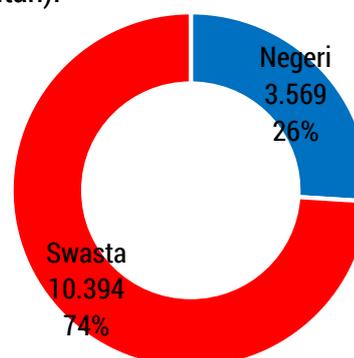
Metode Analisis

Kajian ini menggunakan metode studi pustaka Metode analisis data merupakan tahapan proses penelitian dimana data yang sudah dikumpulkan untuk diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah. Analisa data yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif analisis, dimana data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk grafik, gambar, tabel, maupun diagram, disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan.

Profil Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Jumlah SMK

Pada tahun 2018, jumlah SMK yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia mencapai 13.963 unit, dengan jumlah unit SMK yang dioperasikan oleh pihak swasta hampir tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan unit SMK yang dioperasikan atau disediakan oleh negara (pemerintah).

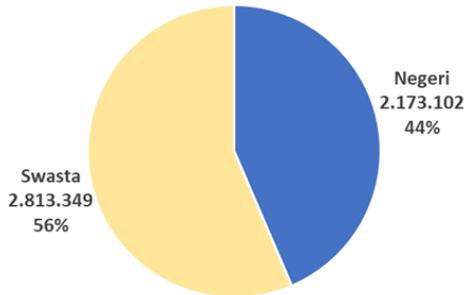


Sumber: Dapodik, Data verval per 31 Desember 2018 (diolah GTK)

Gambar 1. Jumlah SMK berdasarkan Status Sekolah

Seperti yang tertera pada Gambar 1, SMK negeri berjumlah 3.569 unit atau 26% dari total SMK yang tersedia, sementara jumlah SMK Swasta berjumlah 10.394 atau 74%. Jumlah ini

mengalami peningkatan jumlah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, jumlah SMK yang tersedia sebanyak 12.659 unit, meningkat 1.304 unit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penambahan sekolah ini dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam rangka pemenuhan pemerataan pendidikan di Indonesia (Khurniawan, 2019).



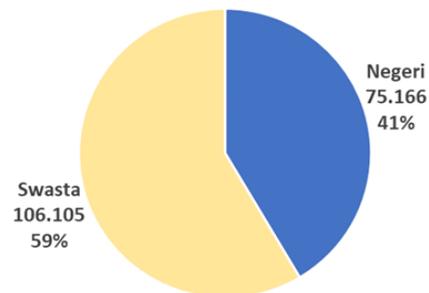
Sumber: Dapodik, data verval per 31 Desember 2018
Gambar 2. Jumlah Peserta Didik berdasarkan Status Sekolah

Jumlah Peserta Didik SMK

Peningkatan jumlah sekolah SMK diikuti pula dengan peningkatan jumlah siswa yang bersekolah di SMK. Pada tahun ajaran 2018, jumlah murid SMK mencapai 4.9 juta siswa, dimana jumlah tersebut meningkat sebesar 10.95% dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Uniknya, meskipun jumlah sekolah swasta yang tersedia di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sekolah negeri yang tersedia, namun jumlah siswa di SMK swasta dan negeri tidak begitu jauh berbeda. Berdasarkan Gambar 2, jumlah siswa di SMK swasta sekitar 2.8 juta, sedikit lebih tinggi dibandingkan jumlah siswa di SMK negeri yang berjumlah sekitar 2.1 juta siswa atau 44% dari total siswa SMK. Hal ini menandakan bahwa masih banyak masyarakat yang tertarik dengan sekolah negeri karena selain tidak kalah saing dengan sekolah swasta, sekolah negeri pun cenderung menyediakan fasilitas yang lengkap dan juga gratis.

Jumlah Rombongan Belajar (Rombel)

Rombongan belajar atau biasa disebut dengan rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Rombel identik dengan banyaknya kelas dalam suatu sekolah. Keberadaan jumlah rombongan belajar dalam suatu satuan pendidikan menjadi sangat penting untuk menetapkan jumlah jam mengajar yang harus dipenuhi oleh guru. Sejalan dengan jumlah siswa, jumlah rombel di SMK negeri juga tidak terlalu berbeda dengan jumlah rombel di sekolah swasta. Sebagaimana tertera pada Gambar 3, jumlah rombongan belajar SMK negeri sebanyak 75.166 rombongan, 18% lebih sedikit dibandingkan dengan rombel yang ada di SMK.



Sumber: Dapodik, Data verval per 31 Desember 2018
Gambar 3. Jumlah Rombongan Belajar berdasarkan Status Sekolah

Profil Guru SMK

Jumlah Guru SMK

Jumlah guru SMK yang ada di Indonesia dihitung berdasarkan guru yang berstatus aktif dan mengajar mata pelajaran yang jelas di satu sekolah induk (tidak termasuk kepala sekolah yang sudah tidak mengajar/ membimbing). Seperti yang tertera pada Tabel 1, terlihat bahwa total guru yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 266.092 jiwa dengan jumlah guru yang mengabdikan diri di SMK Negeri dan Swasta tidak terlalu jauh berbeda. Total Guru yang mengajari di SMK negeri sebesar 133.746 jiwa, atau 14.000

lebih banyak dibandingkan dengan jumlah guru yang mengajar di SMK Swasta.

Apabila dilihat berdasarkan status guru, proporsi guru PNS di sekolah negeri jauh lebih banyak dibandingkan dengan guru PNS yang berada di sekolah swasta. Jumlah guru PNS di SMK negeri sebesar 81.107 guru sementara jumlah guru PNS di SMK swasta hanya sekitar 7% dari jumlah guru PNS di SMK negeri, yaitu sebesar 5.836 guru. Selain guru PNS, guru non PNS juga ikut berkontribusi dalam memberikan pendidikan dan pengajaran bagi peserta didik. Guru Non PNS terdiri dari guru Guru Tetap Yayasan (GTY)

dan Guru Tidak Tetap (GTT). GTY merupakan guru tetap yang mengabdikan pada sekolah swasta dimana pemberian honor dan gaji sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah yang bersangkutan. GTY mendominasi sekolah swasta, bahkan jumlahnya lebih dari 3 kali GTT, yaitu hampir mencapai 100ribu guru. Sementara jumlah guru tidak tetap di SMK Negeri hampir dua kali dari jumlah guru tidak tetap di SMK swasta, yaitu masing-masing sebesar 52.639 guru dan 27.041 guru. Tingginya jumlah GTT dan GTY menjadi indikasi bahwa masih banyak sekolah yang kekurangan guru.

Tabel 1 Jumlah Guru SMK Berdasarkan Status Sekolah

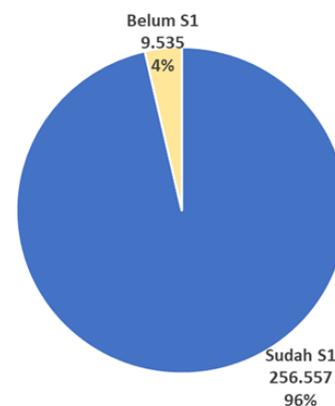
STATUS SEKOLAH	PNS	GTY	GTT	Grand Total
Negeri	81.107		52.639	133.746
Swasta	5.836	99.469	27.041	132.346
Grand Total	86.943	99.469	79.680	266.092

Sumber: Dapodik, Data verval per 31 Desember 2018

Kualifikasi Guru SMK

Guru sebagai tenaga pendidik yang berhubungan langsung dengan peserta didik harus memiliki keahlian khusus atau kualifikasi khusus di bidang akademik. Berdasarkan UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Untuk tingkat SMK, guru harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 (D4) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan serta diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Dengan

kompetensi yang dimilikinya, guru diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik untuk mencerdaskan peserta didik.



Sumber: Dapodik, Data verval per 31 Desember 2018

Gambar 4. Jumlah Guru dengan Kualifikasi Akademik S1

Berdasarkan Gambar 4 dan Tabel 2, diperoleh bahwa secara umum guru yang ada di Indonesia telah memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 Tahun 2007.

Sebanyak 256.557 atau 96% guru telah mendapatkan pendidikan S1, hanya 9.535 atau 4% guru yang masih belum mendapatkan Pendidikan S1. Guru yang tersedia diharapkan

dapat mengajarkan bidang studi yang menjadi tugasnya dengan baik dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa.

Tabel 2 Jumlah Guru SMK Berdasarkan Status Sekolah

KUALIFIKASI	Sudah S1	Belum S1	Grand Total
Negeri	131.501	2.245	133.746
Swasta	125.056	7.290	132.346
Grand Total	256.557	9.535	266.092

Sumber: Dapodik, Data verval per 31 Desember 2018

Jumlah Guru SMK yang telah mendapatkan Sertifikasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi guru merupakan suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu dan juga uji kompetensi tenaga pendidik didalam mekanisme teknis yang sudah diatur oleh pemerintah. Tenaga pendidikan yang sudah memperoleh Sertifikat Pendidik dinilai telah profesional didalam

membuat sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Jumlah tenaga pendidik yang telah dan belum memiliki sertifikat pendidikan ditampilkan pada Tabel 3. Terdapat 100.509 guru atau sekitar 38% dari total guru yang tersedia yang telah memiliki sertifikasi. Meskipun lebih banyak guru yang belum memperoleh sertifikat (165.583 guru), namun diharapkan guru/pendidik, baik yang telah mempunyai sertifikat pendidik maupun yang belum memiliki sertifikasi bisa membawa perubahan untuk pendidikan menjadi yang lebih baik dari segi proses ataupun output.

Tabel 3 Jumlah Guru SMK Berdasarkan Status Sekolah

SERTIFIKASI	Sudah Sertifikasi	Belum Sertifikasi	Grand Total
Negeri	63.746	70.000	133.746
Swasta	36.763	95.583	132.346
Grand Total	100.509	165.583	266.092

Sumber: Dapodik, Data verval per 31 Desember 2018

Proyeksi Jumlah Guru Kejuruan yang Pensiun

Proyeksi Guru Kejuruan yang Pensiun Tahun 2019-2024

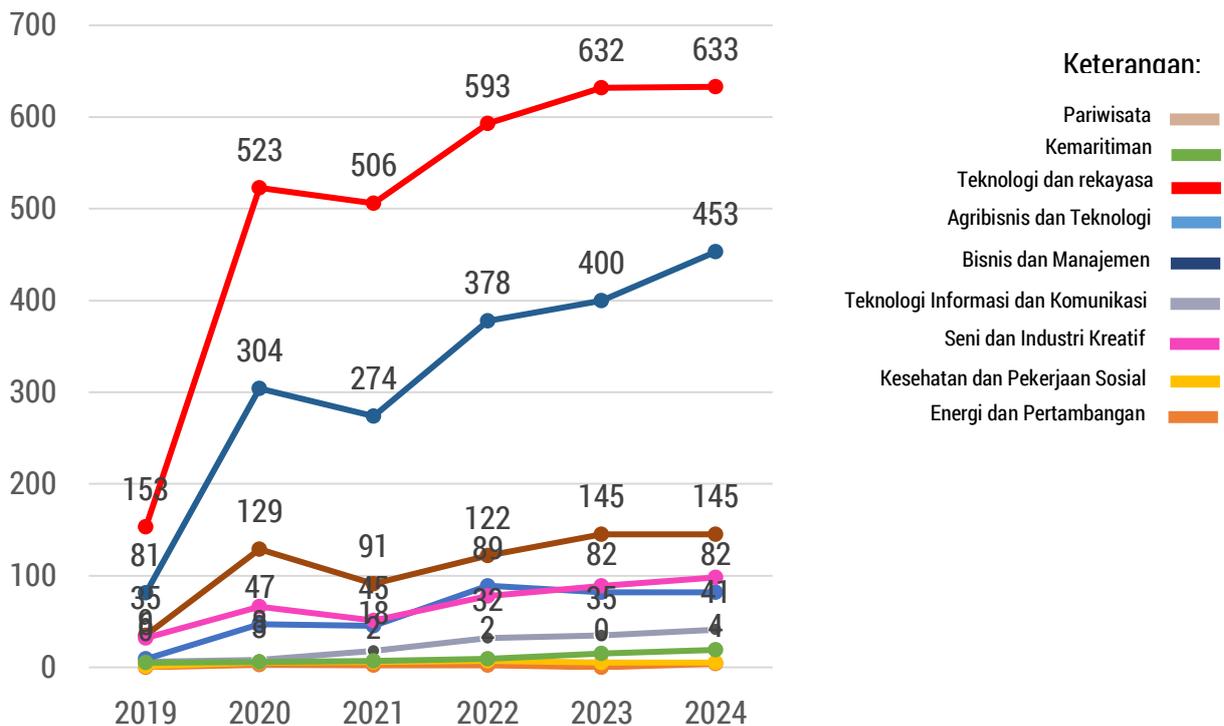
Aturan tentang masa jabatan guru tertuang dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari masa jabatannya apabila telah mencapai batas usia

pensiun, yaitu pada usia 60 tahun. Sebagaimana yang tertera pada Gambar 5, terdapat peningkatan jumlah guru kejuruan yang akan pensiun di SMK Negeri sering penambahan tahun. Peningkatan jumlah guru kejuruan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2020. Pada tahun 2019, jumlah guru yang akan pensiun di SMK negeri sebanyak 322 orang dimana guru pensiun di bidang keahlian teknologi dan rekayasa mencapai 48% dari total

guru yang akan pensiun pada SMK negeri, yaitu sebanyak 153 orang. Selain itu, guru yang akan pensiun pada bidang keahlian bisnis dan manajemen juga cukup banyak, yaitu seperempat dari total guru SMK negeri yang pensiun pada tahun 2019 (81 orang). Untuk bidang lainnya, jumlah guru yang habis masa jabatannya pada tahun 2019 berkisar antara 1 hingga 35 orang, dan guru kejuruan pada bidang energi dan pertambangan tidak ada yang pensiun pada tahun 2019.

kejuruan SMK yang pensiun apalagi pada jurusan Teknologi dan Rekayasa serta Bisnis dan Manajemen. Diproyeksikan pada tahun 2024 akan ada sebanyak 1.480 guru kejuruan yang akan pensiun pada SMK Negeri. Total guru kejuruan PNS yang akan pensiun dari SMK Negeri dari tahun 2019 hingga 2024 adalah sebanyak 6.6006 orang. Artinya, dari 38.638 guru kejuruan yang ada di SMK Negeri pada tahun 2018, lebih dari seperempatnya atau 17.10% akan habis masa jabatannya di tahun 2024.

Pada tahun-tahun selanjutnya, terjadi peningkatan yang signifikan akan jumlah guru



Sumber: Dapodik, Data verval per 31 Desember 2018

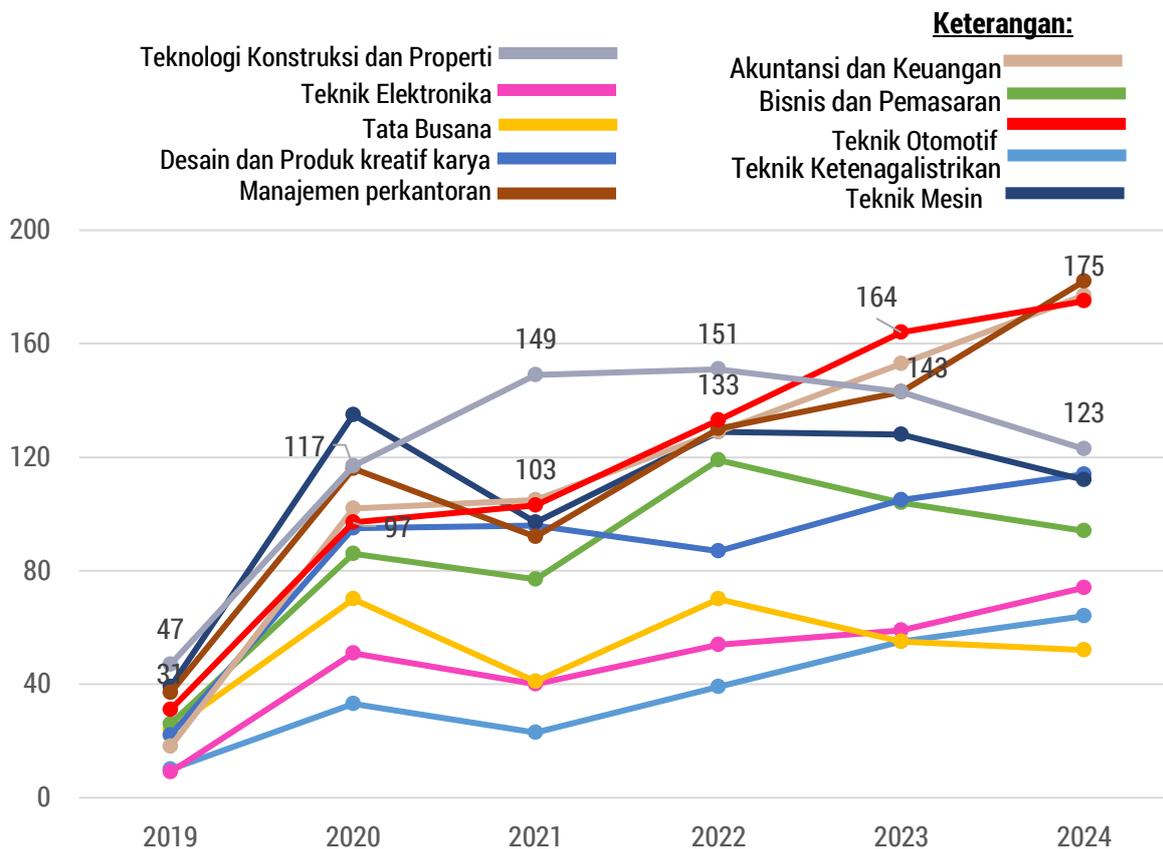
Gambar 5. Proyeksi Jumlah Guru Kejuruan yang akan Pensiun di SMK Negeri

Proyeksi Guru Kejuruan yang Pensiun Berdasarkan 10 Program Keahlian (dengan jumlah pensiun Tertinggi) Tahun 2019-2024

Dari 48 program keahlian yang ada di SMK, 10 program keahlian yang akan mengalami kekurangan guru kejuruan terbanyak adalah program keahlian teknologi konstruksi dan properti, teknik otomotif, manajemen

perkantoran, akuntansi dan keuangan, teknik mesin, teknik ketenagalistrikan, bisnis dan pemasaran, tata busana, teknik elektronika serta desain dan produk kreatif kriya. Untuk tahun 2019 hingga 2024, program keahlian dengan jumlah guru pensiun terbanyak adalah program keahlian teknologi konstruksi dan properti (730 orang), teknik otomotif (703 orang) dan manajemen perkantoran (700 orang). Untuk

sebaran jumlah guru kejuruan SMK Negeri yang pensiun pada 10 program keahlian tersebut tertera pada Gambar 6.



Sumber: Dapodik, Data verval per 31 Desember 2018

Gambar 6. Proyeksi Jumlah Guru Kejuruan yang akan Pensiun di SMK Negeri

Berdasarkan Gambar 6, guru kejuruan yang pensiun di SMK Swasta pada tahun 2019 kurang dari 50 orang. Guru pensiun paling banyak pada program keahlian teknologi konstruksi dan properti, yaitu sebanyak 47 orang, disusul dengan program keahlian teknik mesin yaitu sebanyak 39 orang. Untuk tahun-tahun selanjutnya, jumlah guru kejuruan yang habis masa jabatannya untuk 10 program keahlian tersebut berfluktuatif. Hanya program keahlian akuntansi dan keuangan serta teknik otomotif yang jumlah guru pensiunnya meningkat tiap tahunnya. Kemudian, pada tahun 2024, tiga program keahlian dengan jumlah pensiun tertinggi adalah manajemen perkantoran sebanya 182 orang, akuntansi dan keuangan sebanyak 177 orang dan teknik otomotif

sebanyak 175 orang. Sementara jumlah pensiunan guru kejuruan untuk tujuh program keahlian lainnya sekitar 50 hingga 125 orang.

Kebutuhan Guru SMK Tahun 2019

Profil guru dan jumlah kebutuhan guru SMK, baik yang mengampu mata pelajaran umum maupun mata pelajaran kejuruan/kejuruan pada tahun 2019 dijelaskan pada Tabel 4. Diketahui bahwa dari 81.107 guru PNS yang tersebar di SMK Negeri yang ada di Indonesia, akan ada 690 guru yang akan pensiun di tahun 2019. Jumlah guru ideal untuk tahun yang sama adalah sebanyak 193.259 guru, artinya akan ada kekurangan guru PNS untuk mata pelajaran umum dan kejuruan sebanyak 119.412 guru. Selain terjadi

kekurangan guru pada SMK Negeri, terjadi pula kelebihan guru PNS yang mengajar mata pelajaran tertentu. Sebanyak 6.570 guru PNS tidak bisa memenuhi beban kerja sesuai peraturan yang berlaku. Jika kelebihan guru tersebut di redistribusi untuk memenuhi

kekurangan guru atau dipindahkan ke sekolah lain yang membutuhkan guru umum ataupun guru kejuruan, maka total guru yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi ideal akan berjumlah 112.842 guru, baik guru umum maupun guru kejuruan.

Tabel 4 Kebutuhan Guru di SMK Negeri

PNS	Jumlah guru ideal	Jumlah guru pensiun	Kekurangan guru	Kelebihan guru	Kekurangan guru setelah redistribusi
81.107	193.259	690	119.412	6.570	112.842

Sumber: Data Olahan GTK

Kebutuhan Guru Umum berdasarkan Mata Pelajaran

Profil guru dan jumlah kebutuhan guru SMK yang mengampu mata pelajaran umum pada tahun 2019 diterangkan pada Tabel 5. Terlihat bahwa, dari 42.469 guru PNS yang mengampu mata pelajaran umum di SMK Negeri, akan ada 368 guru yang akan pensiun di tahun ini. Jumlah guru ideal SMK untuk tahun 2019 adalah sebanyak 108.951 guru, artinya akan ada kekurangan guru PNS untuk mata pelajaran umum pada SMK Negeri sebanyak 71.830 guru.

Di lain sisi, terdapat pula kelebihan guru PNS pada mata pelajaran tertentu. Sebanyak 4.980 guru PNS tidak bisa memenuhi beban kerja sesuai peraturan yang berlaku akibat telah terpenuhinya guru umum di sekolah tempat mereka mengabdikan. Jika kelebihan guru tersebut di redistribusi untuk memenuhi kekurangan guru umum atau dipindahkan ke sekolah lain yang membutuhkan guru umum, maka total guru yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi ideal akan berjumlah 66.850 guru umum.

Tabel 5. Kebutuhan Guru Mata Pelajaran Umum di SMK Negeri

Jenis mata pelajaran	PNS	Jumlah guru ideal	Jumlah guru pensiun	Kekurangan guru	Kelebihan guru	Kekurangan guru setelah redistribusi
UMUM	42.469	108.951	368	71.830	4.980	66.850

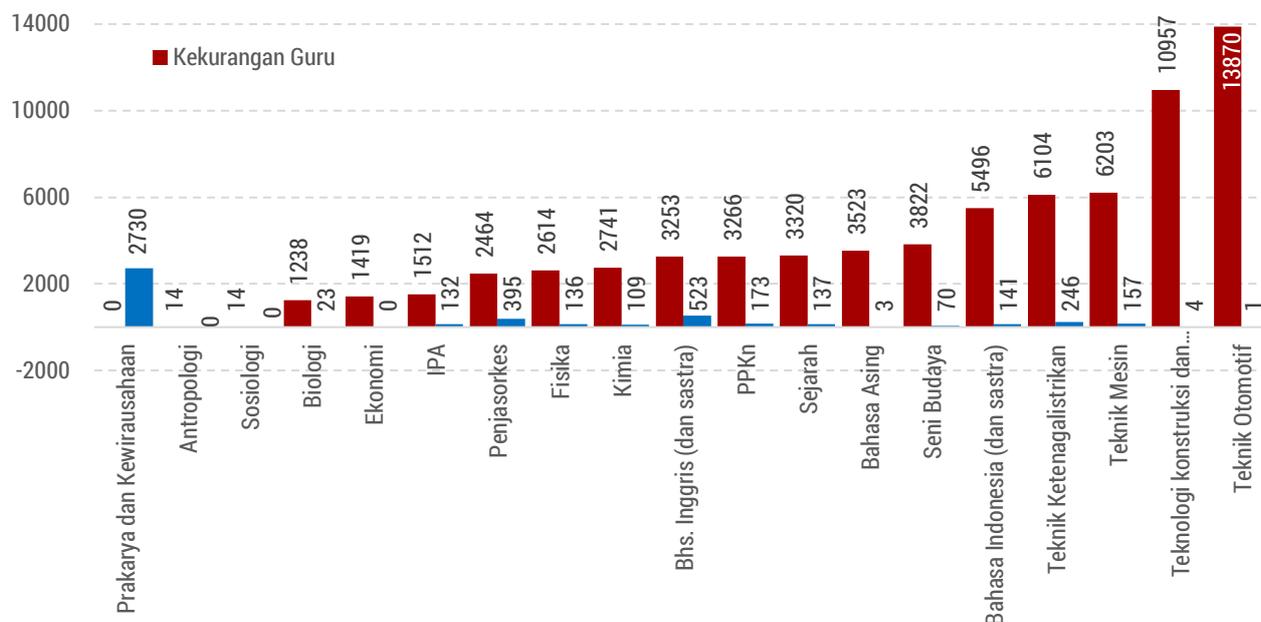
Sumber: Data Olahan GTK

Kebutuhan guru yang mengajar mata pelajaran umum di SMK negeri Tahun 2019 secara rinci dijelaskan pada Gambar 7. Secara umum, pada setiap mata pelajaran umum masih terjadi kekurangan guru PNS terutama untuk guru TIK. Kekurangan guru yang mengampu mata pelajaran TIK mencapai 13.870 orang, disusul dengan kekurangan guru BK sebanyak 10.957 orang. Namun demikian karena sebaran yang

tidak merata, terjadi pula kelebihan guru PNS pada mata pelajaran tersebut, yaitu masing-masing sebanyak 1 dan 4 orang. Hal ini menandakan bahwa masih ada guru umum yang dengan konsentrasi TIK dan BK yang tidak mengajar sesuai dengan keahliannya tersebut. Di lain sisi, untuk mata pelajaran Bahasa Inggris (dan Sastra) serta Penjasorkes, meskipun jumlah gurunya masih jauh dari jumlah guru

ideal, namun terjadi kelebihan guru atau guru yang tidak bisa memenuhi beban kerja sesuai peraturan yang berlaku karena telah

terpenuhinya guru umum bidang tersebut di sekolah tempat mereka mengabdikan, yaitu masing-masing berturut-turut sebanyak 523 dan 395 orang.



Sumber: Data Olahan GTK

Gambar 7. Kebutuhan Guru Umum di SMK Negeri Tahun 2019

Untuk mata pelajaran ekonomi, sosiologi dan antropologi, semua guru bisa memenuhi beban kerja sesuai peraturan yang berlaku atau dikatakan distribusi guru telah menyebar secara merata untuk seluruh sekolah. Untuk mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan, terjadi kelebihan guru yang cukup banyak di beberapa wilayah hingga 2.730 orang. Hal ini dikarenakan belum diakuinya beban kerjanya pada mata pelajaran tersebut. Pada Kurikulum 2013, mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan masuk dalam mata pelajaran umum, namun pada Revisi Kurikulum SMK 2013 berubah menjadi Produk Kreatif dan Kewirausahaan yang masuk ke dalam mata pelajaran kompetensi keahlian, sehingga guru Prakarya dan Kewirausahaan yang ada sekarang belum diakui beban kerjanya.

Kebutuhan Guru Kejuruan Berdasarkan Bidang Keahlian

Profil guru dan jumlah kebutuhan guru SMK yang mengampu mata pelajaran kejuruan pada

tahun 2019 diterangkan pada Tabel 6. Terlihat bahwa, dari 36.638 guru PNS yang mengampu mata pelajaran kejuruan di SMK Negeri, akan ada sebanyak 322 guru yang akan pensiun di tahun yang sama. Dengan jumlah guru ideal untuk tahun 2019 sebanyak 84.308 guru, akan ada kekurangan guru PNS untuk mata pelajaran kejuruan untuk SMK Negeri sebanyak 26.617 guru.

Selain terjadi kekurangan guru kejuruan pada SMK Negeri, terdapat pula kelebihan guru PNS yang mengajar mata pelajaran kejuruan. Sebanyak 1.590 guru PNS tidak bisa memenuhi beban kerja sesuai peraturan yang berlaku dikarenakan telah terpenuhinya guru kejuruan di sekolah tempat mereka bertugas. Jika kelebihan guru tersebut di redistribusi untuk memenuhi kekurangan guru kejuruan atau dipindahkan ke sekolah lain yang membutuhkan guru kejuruan, maka total guru yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi ideal akan berjumlah 45.992 guru kejuruan.

Tabel 6. Kebutuhan Guru Kejuruan di SMK Negeri

Jenis mata pelajaran	PNS	Jumlah guru ideal	Jumlah guru pensiun	Kekurangan guru	Kelebihan guru	Kekurangan guru setelah redistribusi
Kejuruan	36.638	84.308	322	26.617	1.590	45.992

Sumber: Data Olahan GTK

Kebutuhan Guru Kejuruan berdasarkan Bidang Keahlian

Sebaran kebutuhan guru kejuruan berdasarkan Bidang Keahlian secara terperinci tertera pada Tabel 7. Berdasarkan Tabel 7, diperoleh bahwa guru yang paling banyak dibutuhkan yaitu guru kejuruan yang mengampu mata pelajaran di bidang teknologi dan rekayasa yaitu sebanyak 15.063 orang, disusul dengan bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi sebanyak 11.658 orang. Sementara kekurangan guru kejuruan pada bidang keahlian lainnya berada pada rentang 239 hingga 4.150 guru. Kekurangan guru kejuruan paling sedikit pada

bidang keahlian energi dan pertambangan yaitu hanya 239 guru.

Di lain sisi, terjadi pula kelebihan guru kejuruan karena tidak meratanya kebutuhan dan pesebaran guru kejuruan untuk tiap sekolah. Sebanyak 1.590 guru kejuruan yang tidak dapat mengajar sesuai dengan keahlian yang dimiliki, dengan kelebihan terbanyak pada bidang keahlian teknologi dan rekayasa, yaitu sebesar 799 guru. Kelebihan guru pada bidang agribisnis dan agroteknologi juga cukup besar, yaitu mencapai 207 guru kejuruan. Sementara, kelebihan guru pada bidang keahlian energi dan pertambangan hanya kurang dari 10 guru kejuruan.

Tabel 7. Kebutuhan Guru Kejuruan berdasarkan Bidang Keahlian

Bidang keahlian	Kekurangan guru	Kelebihan guru	Kekurangan guru setelah redistribusi
Teknologi dan rekayasa	-15.063	799	-14.264
Agribisnis dan agro teknologi	-4.150	207	-3.943
Pariwisata	-4.306	171	-4.135
Kemaritiman	-1.588	139	-1.449
Bisnis dan manajemen	-8.347	105	-8.242
Seni dan industri kreatif	-1.269	97	-1.172
Teknologi informasi dan komunikasi	-11.658	60	-11.598
Energi dan pertambangan	-239	8	-231
Kesehatan dan pekerjaan sosial	-962	4	-958
Total	-47.582	1.590	-45.992

Sumber: Data Olahan GTK

Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa

Berdasarkan Tabel 8, dari 14.177 guru PNS yang bertugas mengajar bidang keahlian teknologi dan rekayasa, akan ada sebanyak 153 guru yang

pensiun di tahun 2019. Dengan jumlah guru ideal untuk bidang keahlian teknologi dan rekayasa sebanyak 28.288 guru, maka akan terjadi kekurangan guru PNS yang mengajar pada

bidang keahlian teknologi dan rekayasa sebanyak 15.063 guru. Meskipun terjadi kekurangan guru dalam jumlah cukup besar, namun di beberapa sekolah masih terdapat kelebihan guru kejuruan pada bidang keahlian tersebut akibat sebaran guru yang tidak merata.

Total, sebanyak 799 guru PNS kejuruan pada pada bidang keahlian teknologi dan rekayasa yang tidak bisa memenuhi beban kerja sesuai peraturan yang berlaku karena telah terpenuhinya kebutuhan guru pada bidang tersebut di sekolah tempat mereka mengajar.

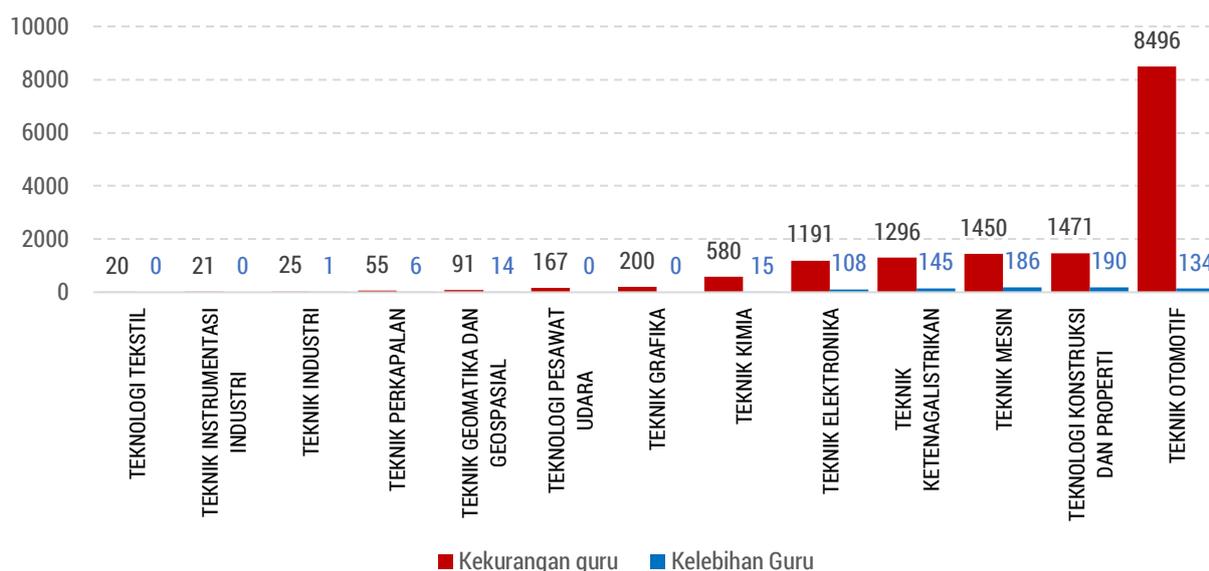
Tabel 8. Kebutuhan Guru Kejuruan di Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa

Bidang keahlian	PNS	Jumlah guru ideal	Jumlah guru pensiun	Kekurangan guru	Kelebihan guru
teknologi dan rekayasa	14.177	28.288	153	-15.063	799

Sumber: Data Olahan GTK

Sebagaimana dijelaskan pada Gambar 8, SMK Negeri pada bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa secara umum masih kekurangan guru kejuruan untuk tiap program keahliannya. Kekurangan guru mata pelajaran kejuruan terutama pada bidang keahlian Teknik Otomotif, Teknologi Konstruksi dan Properti, Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan dan Teknik Elektronika. Namun demikian karena sebaran guru kejuruan yang tidak merata untuk tiap

sekolah, terjadi pula kelebihan guru PNS pada program keahlian tersebut di beberapa sekolah. Sementara untuk program keahlian teknik grafika, teknologi pesawat udara, teknik instrumentasi industri dan teknologi tekstil, pesebaran guru kejuruan yang mengampu program keahlian tersebut telah merata dan semua guru pada program keahlian tersebut bisa memenuhi beban kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Sumber: Data Olahan GTK

Gambar 8. Kebutuhan Guru Kejuruan berdasarkan Program Keahlian pada bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa

Energi dan Pertambangan

Berdasarkan Tabel 9, terdapat 113 guru PNS yang bertugas mengajar pada bidang Energi dan pertambangan. Untuk tahun 2019, tidak ada

guru yang habis masa jabatannya (pensiun). Dengan jumlah ideal guru sebanyak 344 orang, maka terjadi kekurangan guru dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah guru yang

tersedia. Sebanyak 239 guru dibutuhkan agar terpenuhi kondisi ideal terpenuhi. Sementara terdapat 8 guru PNS yang tidak bisa memenuhi beban kerja sesuai peraturan yang berlaku

karena telah terpenuhinya kebutuhan guru pada bidang tersebut di sekolah tempat mereka mengajar.

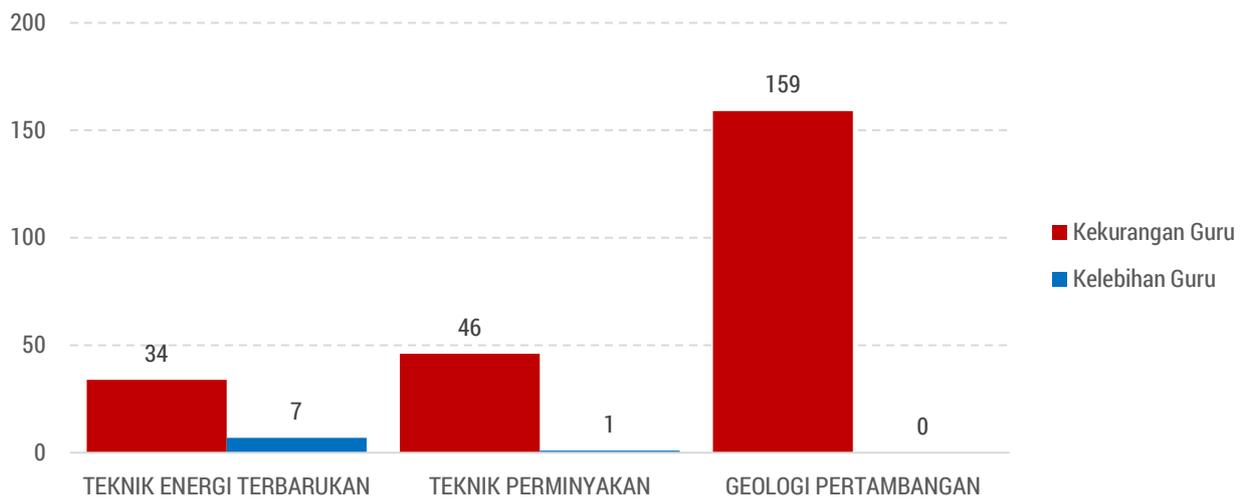
Tabel 9. Kebutuhan Guru Kejuruan di Bidang Keahlian Energi dan Pertambangan

Bidang keahlian	PNS	Jumlah guru ideal	Jumlah guru pensiun	Kekurangan guru	Kelebihan guru
ENERGI DAN PERTAMBANGAN	113	344	0	-239	8

Sumber: Data Olahan GTK

Secara umum, sebagaimana yang tertera pada Gambar 9, masih terdapat kekurangan guru PNS untuk setiap mata pelajaran kejuruan bidang keahlian Energi dan Pertambangan terutama guru pada program keahlian Geologi Pertambangan. Berdasarkan Gambar 9, diperlukan sebanyak 159 guru kejuruan guna pemenuhan kondisi ideal pada program keahlian geologi pertambangan. Sementara pada

program keahlian teknik perminyakan dan teknik energi terbarukan, kekurangan guru masing-masing sebanyak 34 dan 46 guru ssecara berurutan. Sementara, jumlah guru yang tidak dapat mengajar sesuai dengan keahlian karena telah terpenuhinya karena tidak meratanya pesebaran guru di wilayahnya yaitu masing-masing sebanyak 1 dan 7 guru.



Sumber: Data Olahan GTK

Gambar 9. Kebutuhan Guru Kejuruan berdasarkan Program Keahlian pada bidang keahlian Energi dan Pertambangan

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan Tabel 10, dari 4.580 guru PNS yang bertugas mengajar bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, akan ada sebanyak 6 yang akan pensiun di tahun 2019. Dengan jumlah guru ideal untuk bidang keahlian tersebut

sebanyak 16.172 guru, maka akan terjadi kekurangan guru PNS kejuruan sebanyak 11.658 guru. Selain terjadi kekurangan guru, terjadi pula kelebihan guru PNS pada mata pelajaran tertentu akibat sebaran yang tidak merata. Sebanyak 60 guru PNS yang tidak bisa

memenuhi beban kerja sesuai peraturan yang berlaku karena telah terpenuhinya kebutuhan

guru pada bidang tersebut di sekolah tempat mereka mengajar.

Tabel 10. Kebutuhan Guru Kejuruan di Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang keahlian	PNS	Jumlah guru ideal	Jumlah guru pensiun	Kekurangan guru	Kelebihan guru
TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI	4.580	16.172	6	11.658	60

Sumber: Data Olahan GTK

Secara umum, masih terjadi kekurangan guru PNS pada setiap mata pelajaran kejuruan bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berdasarkan Gambar 10, diperlukan sebanyak 11.611 guru mata pelajaran kejuruan guna pemenuhan kondisi ideal pada program keahlian Teknik Komputer dan Informatika. Sementara di beberapa sekolah, total terdapat 59 guru yang tidak dapat mengajar sesuai keahlian yang dimiliki akibat telah karena telah terpenuhinya kebutuhan guru

pada bidang tersebut di sekolah tempat mereka mengajar.

Di lain sisi, pada program keahlian teknik telekomunikasi, masih kekurangan guru sebanyak 47 guru untuk mencapai kondisi ideal. Pesebaran guru pada program keahlian ini juga masih tidak merata, karena masih terdapat seorang guru yang tidak dapat mengajar mata pelajaran kejuruan pada program teknik telekomunikasi karena telah terpenuhi kebutuhan guru tersebut di sekolah mereka.



Sumber: Data Olahan GTK

Gambar 10. Kebutuhan Guru Kejuruan berdasarkan Program Keahlian pada bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kesehatan dan Pekerjaan Sosial

Berdasarkan Tabel 11, dari 193 guru PNS yang bertugas mengajar mata pelajaran kejuruan pada bidang keahlian kesehatan dan pekerjaan sosial, akan ada satu orang guru yang pensiun di tahun 2019. Dengan jumlah guru ideal sebanyak 1.150 guru, maka akan terjadi kekurangan guru

mata pelajaran kejuruan sebanyak 963 guru. Selain terjadi kekurangan guru pada SMK Negeri, terdapat pula kelebihan guru PNS pada mata pelajaran tertentu akibat sebaran yang tidak merata dimana terdapat 4 guru PNS yang tidak bisa memenuhi beban kerja sesuai peraturan yang berlaku.

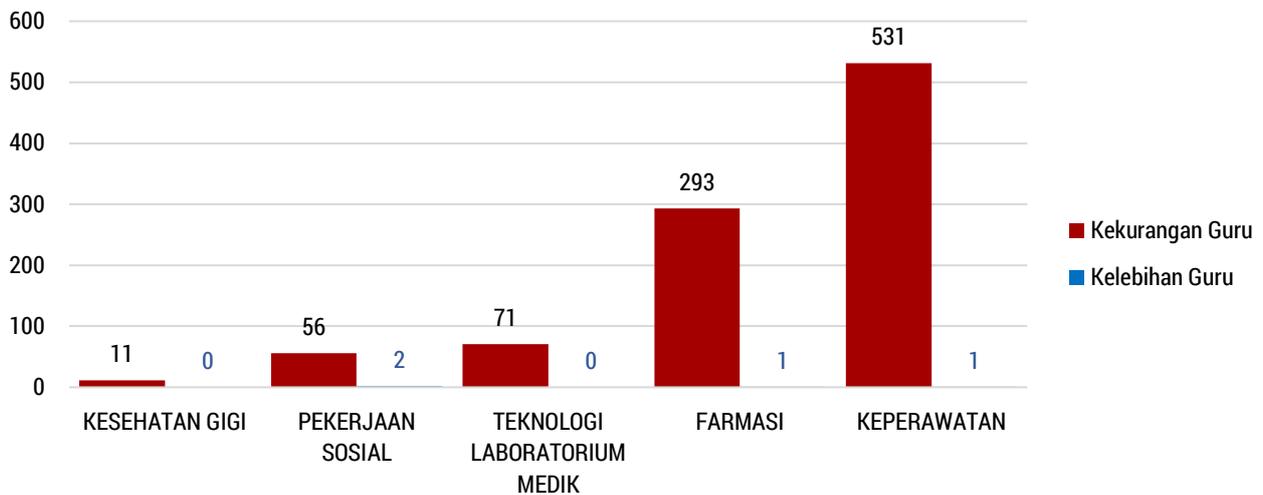
Tabel 11 Kebutuhan Guru Kejuruan di Kesehatan dan Pekerjaan Sosial

Bidang keahlian	PNS	Jumlah guru ideal	Jumlah guru pensiun	Kekurangan guru	Kelebihan guru
KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL	193	1.150	1	-962	4

Sumber: Data Olahan GTK

Secara umum, terjadi kekurangan guru PNS pada setiap mata pelajaran kejuruan bidang keahlian kesehatan dan pekerjaan sosial, terutama untuk program keahlian keperawatan dan Farmasi. Berdasarkan Gambar 11, diperlukan sebanyak 531 dan 239 guru untuk program keahlian tersebut dengan masing-masing sebanyak 1 orang guru yang tidak dapat memenuhi jam kerja sesuai dengan keahlian akibat tidak meratanya jumlah guru kejuruan di

sekolah. Sementara itu, untuk program keahlian teknik laboratorium medik dan kesehatan gigi, jumlah kekurangan guru masing-masing sebesar 71, 56 dan 11 guru. Dimana pada program keahlian teknologi laboratorium medik dan kesehatan gigit, tidak terjadi kelebihan guru kejuruan dan dapat dikatakan bahwa semua guru pada program keahlian tersebut bisa memenuhi beban kerja yang dimilikinya.



Sumber: Data Olahan GTK

Gambar 11. Kebutuhan Guru Kejuruan berdasarkan Program Keahlian pada bidang keahlian Kesehatan dan Pekerjaan Sosial

Agribisnis dan Agroteknologi

Berdasarkan Tabel 11, dari 3.644 guru PNS kejuruan yang bertugas mengajar bidang keahlian agribisnis dan agroteknologi, akan ada sebanyak 9 guru yang pensiun di tahun 2019. Dengan jumlah guru ideal sebanyak 7.578 guru, akan terjadi kekurangan guru PNS sebanyak 4.150 orang. Selain terjadi kekurangan guru

pada SMK Negeri, terdapat pula kelebihan guru PNS pada mata pelajaran tertentu akibat sebaran guru yang tidak merata untuk tiap sekolahnya. Sebanyak 209 guru PNS tidak bisa memenuhi beban kerja sesuai dengan keahlian karena pada beberapa sekolah, jumlah guru kejuruan pada bidang keahlian tersebut lebih banyak dari kebutuhan sekolah.

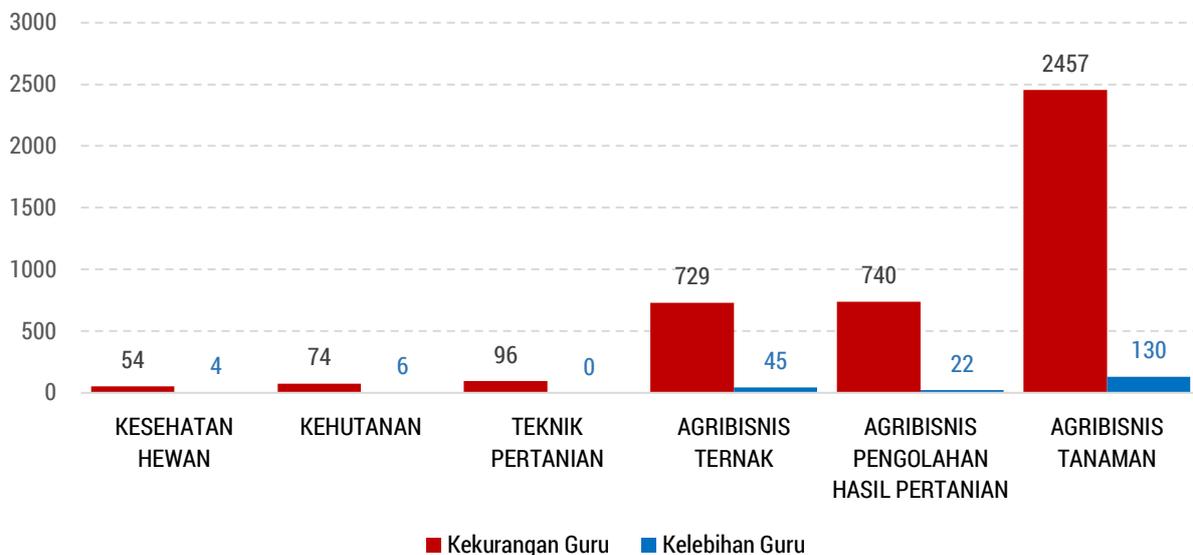
Tabel 12. Kebutuhan Guru Kejuruan di Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi

Bidang keahlian	PNS	Jumlah guru ideal	Jumlah guru pensiun	Kekurangan guru	Kelebihan guru
AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI	3.644	7.578	9	-4.150	207

Sumber: Data Olahan GTK

Secara umum, berdasarkan Gambar 12 terjadi kekurangan guru PNS pada setiap mata pelajaran kejuruan di bidang keahlian agribisnis dan agroteknologi, terutama untuk program keahlian agribisnis tanaman. Dibutuhkan sebanyak 2.457 guru kejuruan untuk dapat memenuhi kondisi ideal pada program keahlian tersebut. Di lain sisi, terdapat 130 guru kejuruan yang perlu didistribusi ke sekolah atau ke wilayah lain agar dapat mengajar sesuai dengan

keahlian yang dimiliki. Guru kejuruan pada program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian dan agribisnis ternak juga kekurangan guru dengan jumlah yang tidak sedikit, yaitu sebanyak 740 dan 729 guru. Untuk program keahlian teknik pertanian, tidak terjadi kelebihan guru kejuruan dan dapat dikatakan bahwa semua guru kejuruan pada program keahlian tersebut bisa memenuhi beban kerja yang dimilikinya.



Sumber: Data Olahan GTK

Gambar 12. Kebutuhan Guru Kejuruan berdasarkan Program Keahlian pada bidang keahlian Agribisnis dan Agroteknologi

Kemaritiman

Berdasarkan Tabel 13, dari 1.686 guru PNS yang bertugas mengajar pada bidang keahlian Kemaritiman, akan ada sebanyak 5 guru yang pensiun di tahun 2019. Dengan jumlah guru ideal untuk sebanyak 3.130 guru, maka akan terjadi kekurangan guru PNS untuk mata pelajaran kejuruan sebanyak 1.588 guru. Selain

terjadi kekurangan guru pada SMK Negeri, terdapat pula kelebihan guru PNS pada mata pelajaran tertentu akibat sebaran yang tidak merata. Sebanyak 139 guru PNS tidak bisa memenuhi beban kerja sesuai peraturan yang berlaku karena telah terpenuhinya kebutuhan guru kejuruan pada bidang keahlian tersebut di sekolah yang diampunya.

Tabel 13. Kebutuhan Guru Kejuruan di Bidang Keahlian Kemaritiman

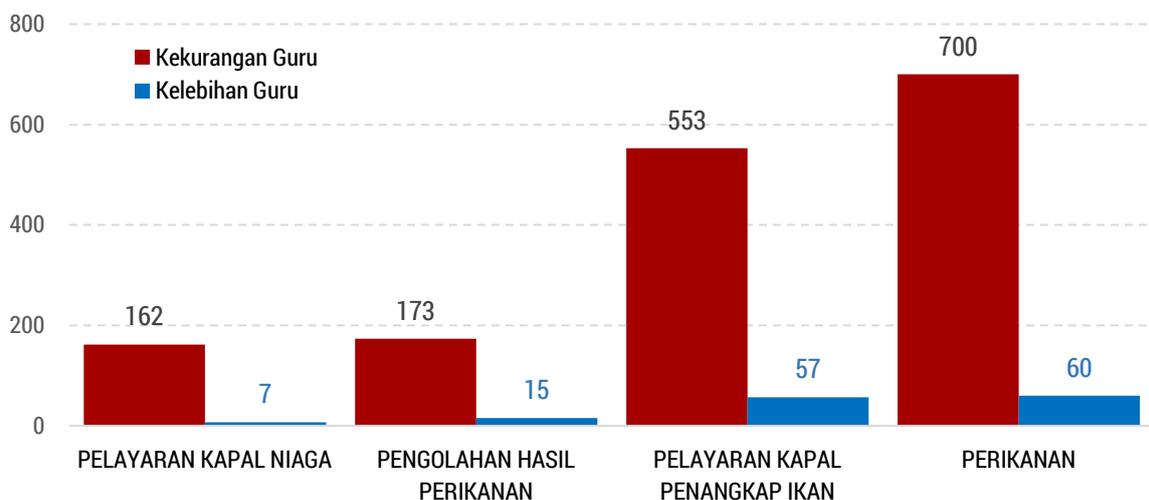
Bidang keahlian	PNS	Jumlah guru ideal	Jumlah guru pensiun	Kekurangan guru	Kelebihan guru
KEMARITIMAN	1.686	3.130	5	-1.588	139

Sumber: Data Olahan GTK

Berdasarkan Gambar 13, terjadi kekurangan guru PNS pada setiap mata pelajaran kejuruan di bidang keahlian kemaritiman, terutama untuk program keahlian perikanan dan pelayaran kapal penangkapan ikan. Tercatat, dibutuhkan sebanyak masing-masing 700 dan 553 guru kejuruan untuk dapat memenuhi kondisi ideal pada program keahlian tersebut. Di lain sisi, karena sebaran yang tidak merata, juga terjadi kelebihan guru PNS pada program keahlian tersebut. Sebanyak masing-masing 60 dan 57 guru yang perlu di relokasi ke sekolah lain agar

dapat mengajar sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

Sementara untuk program keahlian pengolahan hasil perikanan dan pelayaran kapal niaga, terdapat kekurangan sebanyak 173 dan 162 guru kejuruan agar mencapai kondisi ideal. Selain itu, juga terdapat masing-masing sebanyak 7 dan 15 guru kejuruan yang tidak bisa memenuhi beban kerja sesuai dengan keahlian karena pada beberapa sekolah, jumlah guru kejuruan pada program keahlian tersebut lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh sekolah.



Sumber: Data Olahan GTK

Gambar 13. Kebutuhan Guru Kejuruan berdasarkan Program Keahlian pada bidang keahlian Kemaritiman

Bisnis dan Manajemen

Berdasarkan Tabel 12, terdapat 8.086 guru PNS yang bertugas mengajar pada bidang keahlian bisnis dan manajemen. Diantara jumlah tersebut, sebanyak 81 guru akan pensiun di tahun 2019. Dengan jumlah guru ideal sebanyak 16.247 guru, maka akan dibutuhkan guru PNS sebanyak guru yang telah tersedia, yaitu 8.347 guru.

Selain itu, terdapat pula guru PNS yang tidak bisa memenuhi beban kerja tidak bisa memenuhi beban kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki karena pada beberapa sekolah, jumlah guru kejuruan pada bidang keahlian tersebut lebih banyak dari kebutuhan sekolah. Sebanyak 105 guru pada bidang keahlian tersebut yang tidak bisa mengajar sesuai peraturan yang berlaku.

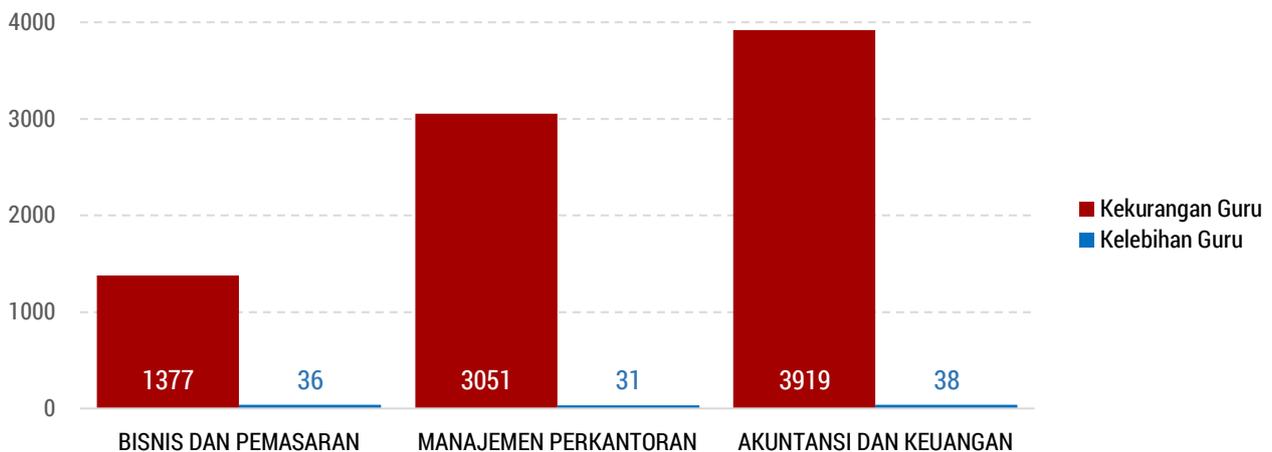
Tabel 14 Kebutuhan Guru Kejuruan di Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen

Bidang keahlian	PNS	Jumlah guru ideal	Jumlah guru pensiun	Kekurangan guru	Kelebihan guru
BISNIS DAN MANAJEMEN	8.086	16.247	81	-8.347	105

Sumber: Data Olahan GTK

Berdasarkan Gambar 16, terjadi kekurangan guru PNS kejuruan pada setiap program keahlian di bidang keahlian bisnis dan manajemen, terutama untuk program keahlian akuntansi dan keuangan serta manajemen perkantoran. Jumlah guru kejuruan yang dibutuhkan pun terbilang banyak, yaitu mencapai 3.919 dan 3.051 secara berturut-turut.

Program keahlian bisnis dan pemasaran juga membutuhkan guru sebanyak 1.377 untuk dapat memenuhi kondisi ideal. Di lain sisi, karena sebaran kebutuhan dan ketersediaan yang tidak merata di sejumlah sekolah, terjadi kelebihan guru PNS kejuruan dengan rentang 31 hingga 38 guru untuk tiap program keahlian pada bidang keahlian bisnis dan manajemen.



Sumber: Data Olahan GTK

Gambar 14. Kebutuhan Guru Kejuruan berdasarkan Program Keahlian pada bidang keahlian Bisnis dan Manajemen

Pariwisata

Berdasarkan Tabel 15, dari 4735 guru PNS yang mengajar pada bidang keahlian pariwisata, akan ada sebanyak 4.735 guru yang pensiun di tahun 2019. Dengan jumlah guru ideal sebanyak 8.835 guru, akan terjadi kekurangan guru PNS sejumlah guru yang tersedia, yaitu sebanyak

4.306 guru. Meskipun terjadi kekurangan guru, namun terdapat pula kelebihan guru PNS yang tidak bisa memenuhi beban kerja. Sebanyak 171 guru kejuruan pada bidang keahlian pariwisata yang perlu didistribusi ke sekolah atau ke wilayah lain agar dapat mengajar sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

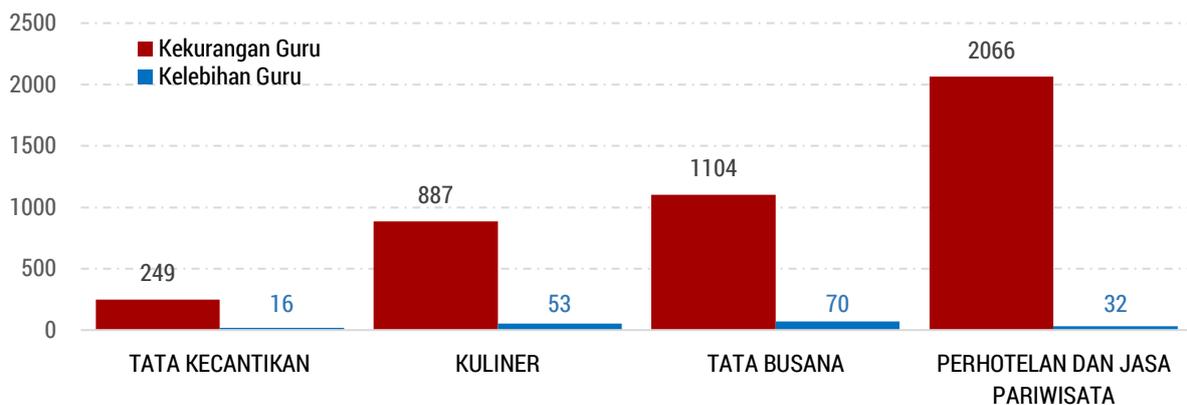
Tabel 15 Kebutuhan Guru Kejuruan di Bidang Keahlian Pariwisata

Bidang keahlian	PNS	Jumlah guru ideal	Jumlah guru pensiun	Kekurangan guru	Kelebihan guru
PARIWISATA	4.735	8.835	35	-4.306	171

Sumber: Data Olahan GTK

Berdasarkan Gambar 15, terjadi kekurangan guru PNS pada setiap mata pelajaran kejuruan di program keahlian pariwisata, terutama untuk program keahlian perhotelan dan tata busana. Jumlah guru kejuruan yang dibutuhkan pun untuk kedua program keahlian tersebut pun terbilang banyak, yaitu mencapai 2.066 dan 1.104 secara berturut-turut. Program keahlian kuliner juga membutuhkan guru kejuruan yang cukup besar untuk dapat memenuhi kondisi ideal, yaitu 887

orang. Di lain sisi, karena sebaran yang tidak merata, terjadi kelebihan guru PNS untuk setiap program keahlian pada bidang keahlian pariwisata. Kelebihan guru paling banyak terjadi di program keahlian tata busana dan juga kuliner. Terdapat masing-masing 70 dan 53 guru kejuruan tidak bisa memenuhi beban kerja sesuai peraturan yang berlaku karena telah terpenuhinya kebutuhan guru kejuruan pada program keahlian tersebut di sekolah yang diampunya.



Sumber: Data Olahan GTK

Gambar 15. Kebutuhan Guru Kejuruan berdasarkan Program Keahlian pada bidang keahlian Pariwisata

Seni dan Industri Kreatif

Berdasarkan Tabel 16, dari 1.424 guru PNS yang bertugas mengajar pada bidang keahlian seni dan industri kreatif, akan ada sebanyak 32 guru yang pensiun di tahun 2019. Dengan jumlah guru ideal sebanyak 1.424 guru, akan terjadi kekurangan guru PNS sebesar 1.269 guru. Meskipun terjadi kekurangan guru, namun

terdapat pula kelebihan guru PNS yang tidak bisa memenuhi beban kerja akibat tidak sesuai kebutuhan guru kejuruan dengan ketersediaan guru kejuruan di sejumlah sekolah. Total terdapat sebanyak 97 guru PNS kejuruan guru pada bidang keahlian tersebut yang tidak bisa mengajar sesuai dengan keahlian pokok yang dimiliki.

Tabel 16 Kebutuhan Guru Kejuruan di Bidang Keahlian Seni dan Industri Kreatif

Bidang keahlian	PNS	Jumlah guru ideal	Jumlah guru pensiun	Kekurangan guru	Kelebihan guru
SENI DAN INDUSTRI KREATIF	1.424	2.564	32	-1.269	97

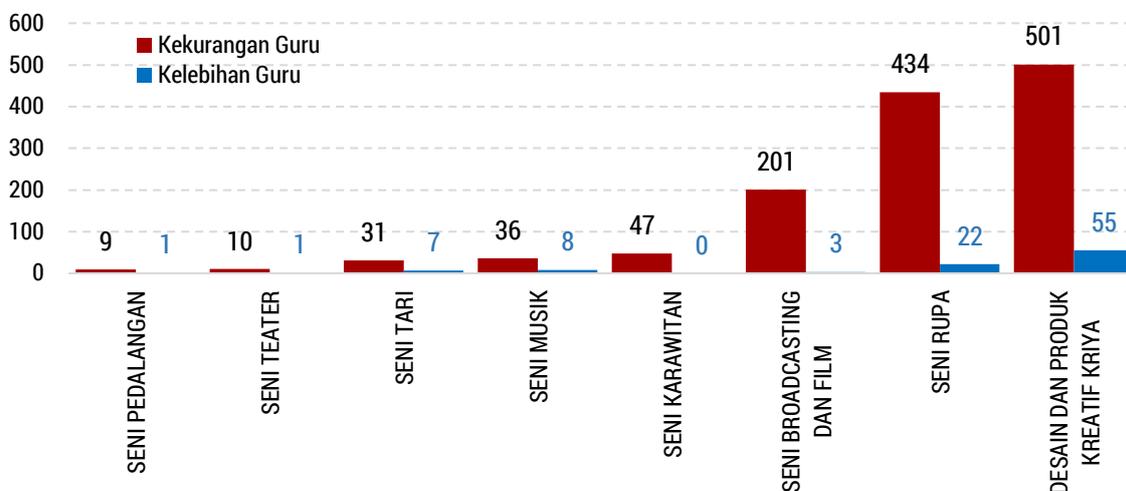
Sumber: Data Olahan GTK

Berdasarkan Gambar 18, terjadi kekurangan guru PNS pada setiap mata pelajaran kejuruan di bidang keahlian seni dan industri kreatif, terutama untuk program keahlian desain dan

produk kreatif kriya, seni rupa dan seni *broadcasting* dan film. Jumlah kebutuhan guru kejuruan pada progra keahlian tersebut masing-masing berjumlah 501, 434 dan 201 guru. Di lain

sisi, karena sebaran dan kebutuhan guru yang tidak merata untuk tiap sekolahnya, terjadi kelebihan guru PNS untuk tiap-tiap program keahlian, kecuali pada program seni karawitan. Kelebihan guru paling banyak terjadi pada program keahlian desain dan produk kreatif

kriya serta program keahlian seni rupa. Total guru yang perlu di redistribusi ke sekolah atau wilayah lain agar dapat mengajar sesuai dengan keahlian untuk kedua program keahlian tersebut masing-masing sebear 502 dan 434 guru kejuruan.



Sumber: Data Olahan GTK

Gambar 16. Kebutuhan Guru Kejuruan berdasarkan Program Keahlian pada bidang keahlian Seni dan Industri Kreatif

Rincian kebutuhan guru kejuruan di SMK Negeri untuk tahun 2019 berdasarkan bidang keahlian secara terperinci dapat di lihat pada Tabel 17. Total terdapat 47.582 guru kejuruan yang diperlukan untuk mencapai kondisi ideal guru. Selain itu, sebanyak 1.590 guru kejuruan tidak bisa memenuhi beban kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku karena jumlah ketersediaan guru di sekolah tempatnya mengabdikan lebih besar dibandingkan dengan jumlah guru kejuruan yang dibutuhkan.

Meskipun apabila 1.590 guru yang tidak memperoleh beban kerja yang sesuai peraturan tersebut didistribusi untuk memenuhi

kekurangan guru yang ada, jumlah kekurangannya masih jauh dari cukup. Masih diperlukan sebanyak 45.992 guru kejuruan untuk memenuhi kondisi ideal pada sembilan bidang keahlian di SMK.

Dengan penambahan bantuan guru honorer ataupun GTT pun, masih belum mencukupi kekurangan yang ada. Dengan bantuan guru honorer/GTT yang ada untuk mengampu mata pelajaran kejuruan sebanyak 23.694, masih dibutuhkan sebanyak 22.298 tenaga kerja guru yang dapat mengajarkan mata pelajaran kejuruan agar kondisi ideal guru dapat dipenuhi.

Tabel 17. Kebutuhan Guru SMK Negeri Tahun 2019 Mata Pelajaran Kejuruan/Kejuruan per Program Keahlian

Bidang keahlian	Kekurangan guru	Kelebihan guru	(+/-) Guru jika terjadi redistribusi	Jml guru honorer/ GTT	(+/-) guru jika ditambah honorer
Teknologi dan rekayasa	-15.063	799	-14.264	5.983	-8.281
Teknologi informasi dan komunikasi	-11.658	60	-11.598	5.719	-5.879

Bidang keahlian	Kekurangan guru	Kelebihan guru	(+/-) Guru jika terjadi redistribusi	Jml guru honorer/ GTT	(+/-) guru jika ditambah honorer
Bisnis dan manajemen	-8.347	105	-8.242	4.671	-3.571
Pariwisata	-4.306	171	-4.135	2.403	-1.732
Agribisnis dan agroteknologi	-4.150	207	-3.943	2.600	-1.343
Kemaritiman	-1.588	139	-1.449	1.000	-449
Seni dan industri kreatif	-1.269	97	-1.172	556	-616
Kesehatan dan pekerjaan sosial	-962	4	-958	595	-363
Energi dan pertambangan	-239	8	-231	167	-64
Grand Total	-47.582	1.590	-45.992	23.694	-22.298

Sumber: Data Olahan GTK

KESIMPULAN

Pendidikan pada jenjang SMK di Indonesia sudah memasuki darurat guru kejuruan hal ini ditandai dengan masih sangat kekurangan guru PNS, khususnya guru kejuruan. Meskipun telah dibantu dengan guru honorer yang terdiri dari guru tidak tetap (GTT) dan guru tetap yayasan (GTY), namun jumlahnya masih jauh dari kata cukup. Belum lagi, kedepannya banyak guru yang pensiun karena berakhirnya masa jabatan. Meskipun terdapat kelebihan guru PNS pada mata pelajaran tertentu akibat tidak meratanya sebaran dan kebutuhan guru di tiap sekolah, namun secara umum semua program keahlian yang ada di SMK masih membutuhkan guru PNS kejuruan dengan angka yang cukup tinggi.

Seiring berjalannya waktu, jumlah guru yang akan pensiun di SMK, khususnya guru kejuruan, semakin meningkat. Bidang keahlian yang akan kehilangan guru kejuruan akibat berakhirnya masa jabatan paling banyak terjadi pada bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa serta Bisnis dan Manajemen. Di lain sisi, program keahlian yang memiliki jumlah guru kejuruan pensiun terbanyak adalah program keahlian teknologi konstruksi dan properti, teknik otomotif dan manajemen perkantoran.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Terkait dengan pemenuhan akan kebutuhan guru kejuruan yang cukup tinggi, terdapat

beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan instansi yang terkait, antara lain:

- Mengingat bahwa saat ini Indonesia sedang memasuki darurat guru kejuruan SMK maka sebaiknya perlu dilakukan pengalihan sementara pengelolaan guru oleh Kemdikbud sampai dengan kondisi ketersediaan guru kejuruan normal kembali. Dengan pengalihan tersebut maka beberapa strategi ini dapat berjalan efektif diantaranya:
 - Pengangkatan guru kejuruan secara sistematis, terstruktur dan masif. Pengangkatan ini dapat dimulai dengan melakukan pengkaderan guru kejuruan dengan memilih lulusan SMK terbaik yang dipersiapkan menjadi guru kejuruan SMK dengan diberi beasiswa S1 dan diberi jaminan pengangkatan menjadi PNS guru kejuruan.
 - Redistribusi guru bagi guru-guru yang tidak bisa memenuhi beban kerja pembelajaran atau pembimbingan disertai peraturan pelaksanaan yang jelas dalam proses pemindahan atau penempatan guru. Hal ini dilakukan agar redistribusi guru lebih *fairness*.
- Melakukan transformasi organisasi P4TK Kejuruan Kemdikbud dengan mengembalikan fungsi utamanya hanya untuk mendidik guru kejuruan SMK yang

- banyak belum dilatih dan mengubah kelembagaannya menjadi sebuah lembaga Badan Layanan Umum (BLU) sehingga organisasi tersebut mampu mandiri dan lebih produktif dan kompetitif dalam menghasilkan guru-guru kejuruan yang handal di Indonesia.
3. Selain itu perlu dilakukan revitalisasi total P4TK Kejuruan Kemdikbud dengan mengganti seluruh peralatan praktek training guru yang sudah sangat kuno dan lebih buruk dari peralatan di SMK saat ini. Kemudian perlu dilakukan penyediaan widyaiswara kejuruan yang sudah hampir seluruhnya pensiun dan belum ada pengantinya.
 4. Mendorong terjadinya revitalisasi LPTK dan Politeknik yang menghasilkan guru kejuruan SMK agar guru kejuruan yang dihasilkannya kompeten karena lebih banyak praktek daripada teori.
 5. Kemdikbud melakukan penataan spektrum keahlian agar tidak terlalu banyak dan spesifik serta mengacu pada *worlds skills*. Untuk keahlian yang lebih spesifik dapat disiapkan melalui lembaga kursus. Sehingga terciptanya sinergi antara SMK dan lembaga kursus kejuruan.
 6. Apabila dibutuhkan, mendorong pemerintah daerah provinsi melakukan peleburan atau penutupan terhadap SMK yang memiliki siswa sedikit dan cenderung menurun tiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [Kemendikbud] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Paparan: Kebutuhan Guru Kejuruan 2020-2024. Dit GTK Kemendikbud
- Khurniawan AW, Erda G. 2019. *White paper: Profil Lulusan SMK Terhadap Tingkat penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2018/2019*
- Kompas. 2011. Daoed Joesoef: Pendidikan Kunci Kemajuan Bangsa. Diakses pada: <https://edukasi.kompas.com/read/2011/10/23/15253241/Daoed.Joesoef.Pendidikan.Kunci.Kemajuan.Bangsa>
- Kompasiana. 2013. Pentingnya Pendidikan untuk Bangsa Ini. Diakses pada <https://www.kompasiana.com/tututindargo/5529f215f17e617b3ed62402/pentingnya-pendidikan-untuk-bangsa-ini>
- Muhson, A. 2004. Meningkatkan Profesionisme Guru: Suatu Harapan. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*. 2 (1): 90-98.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Undang Undang Dasar Negera Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen
- World Bank. 2008. *Teacher Employment and Deployment in Indonesia : Opportunities for Equity, Efficiency and Quality Improvement*. Washington, DC. © World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8110>